



# Susunan dan Kedudukan

Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah, serta Peradilan

pada Masa Hindia Belanda

Koerniatmanto Soetoprawiro

UNPAR PRESS

10.10.2018

# Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda



Koerniatmanto Soetoprawiro

342.029 598

SOE

S

143519 RFB / FH

10.10.2018

**UNPAR PRESS**

Bandung

2018

No. Kelas	342.029 598 SOE S
No. Induk	143519 Tgl 10.10.2018
Hadiah/Dili	
Dari	UNPAR PRESS

*Judul:*

Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda

*Penulis:*

Koerniatmanto Soetoprawiro

*Sampul:*

Tempodoeloe.com & rumahstudio.com

*Penyelaras:*

Melania Atzmarnani

Maria C.

*Sampul dan tata letak isi:*

L. Bobby Suryo K.

*ISBN:*

978-602-6980-70-0

*Penerbit:*

Unpar Press

Jl. Ciumbuleuit No. 100 Bandung

[unparpress@unpar.ac.id](mailto:unparpress@unpar.ac.id)

Cetakan I : 2018



## PENGANTAR

Dewasa ini sistem Pemerintahan (baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan di Daerah) dan sistem Peradilan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*) telah mulai kurang dipahami lagi. Terutama oleh kalangan generasi muda, yang tidak secara langsung mendapat kuliah dari para ahli hukum didikan Belanda. Padahal untuk memahami hukum positif kita sekarang ini tidak jarang pengetahuan kita tentang sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda itu amat membantu. Dengan kata lain, untuk memahami hukum positif kita sekarang ini kiranya merupakan suatu syarat bagi kita untuk mengerti sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda tersebut. Hal ini mengingat bahwa sistem pemerintahan dan peradilan kita dewasa ini banyak bertumpu pada sistem pemerintahan dan peradilan Hindia Belanda. Setidak-tidaknya secara historis amat berpengaruh.

Dalam rangka itulah buku ini disusun dengan judul **Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda**, dengan maksud untuk menggali kembali pengetahuan sejarah hukum tersebut di atas. Secara lebih luas, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sejarah Hukum Indonesia. Bagaimanapun juga Sejarah Hukum Indonesia tetap merupakan sesuatu yang pokok guna memahami Tata Hukum Indonesia itu sendiri.

Namun demikian kiranya uraian buku ini akan menjadi cukup kompleks apabila kita kaji sejarah hukum itu sejak awal- mulanya. Oleh karena itu sebagai sekedar pengantar untuk memahami sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda itu, cukup kiranya jika kita membatasi diri pada kondisi tahun 1942, sebagai titik berat uraian. Mengingat bahwa tahun 1942 merupakan tahun terakhir kekuasaan Belanda di Indonesia, sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Meskipun demikian latar belakang sejarah sebelum tahun 1942 tidak berarti ditinggalkan sama sekali. Pertumbuhan sistem Pemerintahan dan Peradilan sebelum tahun 1942 akan tetap disinggung sejauh hal itu diperlukan guna memperjelas uraian secara keseluruhan. Selanjutnya pada akhir buku akan diuraikan pula 'kesudahan' sistem pemerintahan dan peradilan Hindia Belanda itu. Hal ini dianggap perlu untuk menunjukkan letak simpul sambungannya dengan sistem Pemerintahan dan Peradilan Republik Indonesia dewasa ini.

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Terutama bagi mereka yang sedang mempelajari Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Diharapkan buku ini akan sangat membantu mereka memahami latar belakang sejarah hukum Indonesia. Lebih lanjut, buku ini juga diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para mahasiswa dan para peminat Hukum di Indonesia. Mengingat bahwa pembahasan hukum Indonesia baik privat maupun publik seringkali tidak dapat melepaskan diri dari latar belakang sejarah hukum itu sendiri. Demikian pula halnya dengan para

mahasiswa dan peminat Administrasi, khususnya Administrasi Negara. Buku ini diharapkan dapat membantu mereka. Akhirnya, tentu saja para mahasiswa dan peminat Sejarah Indonesia. Buku ini tentu membantu sekali.

Dalam pada itu buku ini tidak mungkin tertulis tanpa bantuan pelbagai pihak. Untuk itu saya berkewajiban untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan saya.

Pertama-tama ucapan terima kasih saya tujukan kepada Prof. R. Subekti, SH (almarhum) dan Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH. Arahkan dan informasi kedua guru saya itu amat berharga bagi buku ini. Sebagai kenangan atas kedua guru saya itulah, terutama buku ini saya persembahkan.

Dorongan untuk menulis buku ini juga datang dari rekan-rekan saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, terutama saudara Anne Syafrina Kurniasari, SH, Sri Rahayu Octoberina, SH, dan Joni Minulyo, SH. Terima kasih atas dorongan tersebut. Terlebih-lebih kepada saudara Eko Purwanto, SH, saya amat berterima kasih atas jerih payahnya untuk mengedit buku ini.

Namun demikian tanggung jawab atas seluruh materi buku ini, khususnya atas kekurangan serta kelemahan buku ini tetaplah berada pada diri saya pribadi.

Semoga bermanfaat.

Bandung, Februari 1993

## **PENGANTAR EDISI KEDUA**

Buku ini saya susun pada nyaris masa akhir Orde Baru, namun substansinya masih tetap aktual. Jejak-jejak sejarah kolonial masih tetap tampak jelas, juga sampai ke Masa Reformasi ini. Namun demikian, terdapat sejumlah perubahan konstitusional yang mendasar pula. Atas dasar itu, tulisan ini diterbitkan kembali dengan sejumlah perubahan Pasca Masa Reformasi ini. Perubahan tersebut terutama pada bagian Penutup.

Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Tristam Moeliono, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah bersedia memberi Kata Pengantar. Saya juga berterima kasih kepada saudara Budi Prastowo yang telah mendorong saya untuk menerbitkan tulisan saya tentang Sejarah Hukum Indonesia ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Unpar Press, terutama Bobby Suryo, yang telah bersedia menerbitkan naskah saya ini.

Selamat menengok kembali sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Bandung, Agustus 2018

THE HISTORY OF THE  
CITY OF BOSTON

The history of the city of Boston is a story of growth and resilience. From its founding as a small settlement of Puritan settlers, it has evolved into a major center of commerce, industry, and culture. The city's location on a narrow neck of land between the harbor and the mainland has shaped its development, making it a natural port and a hub of activity. Over the centuries, Boston has been the site of significant events, including the American Revolution, the abolitionist movement, and the rise of the Industrial Revolution. Its educational institutions, such as Harvard University and MIT, have played a central role in the city's intellectual and cultural life. Today, Boston is a vibrant city with a rich heritage and a bright future.

## SAMBUTAN

Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2016-2019) saya menyambut baik penerbitan buku dari Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro yang ditulis sejak 1993. Dengan judul “Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda”, penulis hendak menelusuri kembali sejarah ketatanegaraan & administrasi negara dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Buku ini dapat disandingkan pula dengan buku lain yang menulis topik yang sama dari sudut pandang sedikit berbeda, Francien van Aanrooy, *De koloniale staat: 1854-1942; Archief van het Ministerie van Koloniën*, diterbitkan Leiden, Agustus 2014. Terutama bagi ahli sejarah kedua buku ini akan sangat bermanfaat.

Pertanyaannya adalah apakah buku-buku sejarah - bahkan juga tentang sistem hukum masa lalu - akan sama bermanfaatnya bagi para pengemban hukum Indonesia kontemporer? Kita harus cermati bahwa Indonesia sudah merdeka sejak 1945 dan sejak itu sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia jauh berubah untuk melayani masyarakat yang jauh berbeda serta menanggapi situasi yang radikal berbeda. Bahkan UUD 1945 versi asli yang sekalipun masih menunjukkan banyak kemiripan dengan *De Nederlandsch- Indische Staatsregeling, 1926* (dan sebelumnya *Regerings Reglement* atau *Het Reglement op het Beleid der Regeering van Nederlandsch Indië: benevens de overeenkomstige artikelen van de Grondwet en van de Reglementen of het beleid der Regeering in de Koloniën Suriname en Curacao 1855*) sekarang ini sudah jauh berbeda sejak mengalami amandemen pasca keruntuhan pemerintahan Orde Baru.

Menengok dan mempelajari masa lalu, kiranya bukanlah sekadar ikhtiar sia-sia mengenang masa yang tidak akan pernah kembali. Sejarah ditelusuri untuk mendapatkan pemahaman dan juga membuka wawasan bahwa tersedia ragam solusi alternatif di masa lalu untuk menghadapi persoalan-persoalan ketatanegaraan atau tata pemerintahan yang mungkin menunjukkan kemiripan atau justru perbedaan radikal dengan tantangan zaman kini. Buku ini sebagaimana diniatkan penulis ditujukan bagi para pemerhati hukum Indonesia yang ingin memperdalam akar sejarah sistem tata negara dan pemerintahan Indonesia. Bagaimanapun juga – sekalipun sejarah bukanlah proses evolutif berkesinambungan – masih dapat ditemukan adanya benang merah antara masa penjajahan dengan era Indonesia merdeka.

Selamat membaca!  
Dekan Fakultas Hukum UNPAR

Tristam P. Moeliono



Introduction	1
Chapter I	10
Chapter II	25
Chapter III	40
Chapter IV	55
Chapter V	70
Chapter VI	85
Chapter VII	100
Chapter VIII	115
Chapter IX	130
Chapter X	145
Chapter XI	160
Chapter XII	175
Chapter XIII	190
Chapter XIV	205
Chapter XV	220
Chapter XVI	235
Chapter XVII	250
Chapter XVIII	265
Chapter XIX	280
Chapter XX	295
Chapter XXI	310
Chapter XXII	325
Chapter XXIII	340
Chapter XXIV	355
Chapter XXV	370
Chapter XXVI	385
Chapter XXVII	400
Chapter XXVIII	415
Chapter XXIX	430
Chapter XXX	445
Chapter XXXI	460
Chapter XXXII	475
Chapter XXXIII	490
Chapter XXXIV	505
Chapter XXXV	520
Chapter XXXVI	535
Chapter XXXVII	550
Chapter XXXVIII	565
Chapter XXXIX	580
Chapter XL	595
Chapter XLI	610
Chapter XLII	625
Chapter XLIII	640
Chapter XLIV	655
Chapter XLV	670
Chapter XLVI	685
Chapter XLVII	700
Chapter XLVIII	715
Chapter XLIX	730
Chapter L	745
Chapter LI	760
Chapter LII	775
Chapter LIII	790
Chapter LIV	805
Chapter LV	820
Chapter LVI	835
Chapter LVII	850
Chapter LVIII	865
Chapter LIX	880
Chapter LX	895
Chapter LXI	910
Chapter LXII	925
Chapter LXIII	940
Chapter LXIV	955
Chapter LXV	970
Chapter LXVI	985
Chapter LXVII	1000
Chapter LXVIII	1015
Chapter LXIX	1030
Chapter LXX	1045
Chapter LXXI	1060
Chapter LXXII	1075
Chapter LXXIII	1090
Chapter LXXIV	1105
Chapter LXXV	1120
Chapter LXXVI	1135
Chapter LXXVII	1150
Chapter LXXVIII	1165
Chapter LXXIX	1180
Chapter LXXX	1195
Chapter LXXXI	1210
Chapter LXXXII	1225
Chapter LXXXIII	1240
Chapter LXXXIV	1255
Chapter LXXXV	1270
Chapter LXXXVI	1285
Chapter LXXXVII	1300
Chapter LXXXVIII	1315
Chapter LXXXIX	1330
Chapter LXXXX	1345
Chapter LXXXXI	1360
Chapter LXXXXII	1375
Chapter LXXXXIII	1390
Chapter LXXXXIV	1405
Chapter LXXXXV	1420
Chapter LXXXXVI	1435
Chapter LXXXXVII	1450
Chapter LXXXXVIII	1465
Chapter LXXXXIX	1480
Chapter LXXXXX	1495
Chapter LXXXXXI	1510
Chapter LXXXXXII	1525
Chapter LXXXXXIII	1540
Chapter LXXXXXIV	1555
Chapter LXXXXXV	1570
Chapter LXXXXXVI	1585
Chapter LXXXXXVII	1600
Chapter LXXXXXVIII	1615
Chapter LXXXXXIX	1630
Chapter LXXXXXX	1645
Chapter LXXXXXXI	1660
Chapter LXXXXXXII	1675
Chapter LXXXXXXIII	1690
Chapter LXXXXXXIV	1705
Chapter LXXXXXXV	1720
Chapter LXXXXXXVI	1735
Chapter LXXXXXXVII	1750
Chapter LXXXXXXVIII	1765
Chapter LXXXXXXIX	1780
Chapter LXXXXXXX	1795
Chapter LXXXXXXXI	1810
Chapter LXXXXXXXII	1825
Chapter LXXXXXXXIII	1840
Chapter LXXXXXXXIV	1855
Chapter LXXXXXXXV	1870
Chapter LXXXXXXXVI	1885
Chapter LXXXXXXXVII	1900
Chapter LXXXXXXXVIII	1915
Chapter LXXXXXXXIX	1930
Chapter LXXXXXXXX	1945
Chapter LXXXXXXXXI	1960
Chapter LXXXXXXXII	1975
Chapter LXXXXXXXIII	1990
Chapter LXXXXXXXIV	2005
Chapter LXXXXXXXV	2020
Chapter LXXXXXXXVI	2035
Chapter LXXXXXXXVII	2050
Chapter LXXXXXXXVIII	2065
Chapter LXXXXXXXIX	2080
Chapter LXXXXXXXX	2095
Chapter LXXXXXXXXI	2110
Chapter LXXXXXXXII	2125
Chapter LXXXXXXXIII	2140
Chapter LXXXXXXXIV	2155
Chapter LXXXXXXXV	2170
Chapter LXXXXXXXVI	2185
Chapter LXXXXXXXVII	2200
Chapter LXXXXXXXVIII	2215
Chapter LXXXXXXXIX	2230
Chapter LXXXXXXXX	2245
Chapter LXXXXXXXXI	2260
Chapter LXXXXXXXII	2275
Chapter LXXXXXXXIII	2290
Chapter LXXXXXXXIV	2305
Chapter LXXXXXXXV	2320
Chapter LXXXXXXXVI	2335
Chapter LXXXXXXXVII	2350
Chapter LXXXXXXXVIII	2365
Chapter LXXXXXXXIX	2380
Chapter LXXXXXXXX	2395
Chapter LXXXXXXXXI	2410
Chapter LXXXXXXXII	2425
Chapter LXXXXXXXIII	2440
Chapter LXXXXXXXIV	2455
Chapter LXXXXXXXV	2470
Chapter LXXXXXXXVI	2485
Chapter LXXXXXXXVII	2500
Chapter LXXXXXXXVIII	2515
Chapter LXXXXXXXIX	2530
Chapter LXXXXXXXX	2545
Chapter LXXXXXXXXI	2560
Chapter LXXXXXXXII	2575
Chapter LXXXXXXXIII	2590
Chapter LXXXXXXXIV	2605
Chapter LXXXXXXXV	2620
Chapter LXXXXXXXVI	2635
Chapter LXXXXXXXVII	2650
Chapter LXXXXXXXVIII	2665
Chapter LXXXXXXXIX	2680
Chapter LXXXXXXXX	2695
Chapter LXXXXXXXXI	2710
Chapter LXXXXXXXII	2725
Chapter LXXXXXXXIII	2740
Chapter LXXXXXXXIV	2755
Chapter LXXXXXXXV	2770
Chapter LXXXXXXXVI	2785
Chapter LXXXXXXXVII	2800
Chapter LXXXXXXXVIII	2815
Chapter LXXXXXXXIX	2830
Chapter LXXXXXXXX	2845
Chapter LXXXXXXXXI	2860
Chapter LXXXXXXXII	2875
Chapter LXXXXXXXIII	2890
Chapter LXXXXXXXIV	2905
Chapter LXXXXXXXV	2920
Chapter LXXXXXXXVI	2935
Chapter LXXXXXXXVII	2950
Chapter LXXXXXXXVIII	2965
Chapter LXXXXXXXIX	2980
Chapter LXXXXXXXX	2995
Chapter LXXXXXXXXI	3010
Chapter LXXXXXXXII	3025
Chapter LXXXXXXXIII	3040
Chapter LXXXXXXXIV	3055
Chapter LXXXXXXXV	3070
Chapter LXXXXXXXVI	3085
Chapter LXXXXXXXVII	3100
Chapter LXXXXXXXVIII	3115
Chapter LXXXXXXXIX	3130
Chapter LXXXXXXXX	3145
Chapter LXXXXXXXXI	3160
Chapter LXXXXXXXII	3175
Chapter LXXXXXXXIII	3190
Chapter LXXXXXXXIV	3205
Chapter LXXXXXXXV	3220
Chapter LXXXXXXXVI	3235
Chapter LXXXXXXXVII	3250
Chapter LXXXXXXXVIII	3265
Chapter LXXXXXXXIX	3280
Chapter LXXXXXXXX	3295
Chapter LXXXXXXXXI	3310
Chapter LXXXXXXXII	3325
Chapter LXXXXXXXIII	3340
Chapter LXXXXXXXIV	3355
Chapter LXXXXXXXV	3370
Chapter LXXXXXXXVI	3385
Chapter LXXXXXXXVII	3400
Chapter LXXXXXXXVIII	3415
Chapter LXXXXXXXIX	3430
Chapter LXXXXXXXX	3445
Chapter LXXXXXXXXI	3460
Chapter LXXXXXXXII	3475
Chapter LXXXXXXXIII	3490
Chapter LXXXXXXXIV	3505
Chapter LXXXXXXXV	3520
Chapter LXXXXXXXVI	3535
Chapter LXXXXXXXVII	3550
Chapter LXXXXXXXVIII	3565
Chapter LXXXXXXXIX	3580
Chapter LXXXXXXXX	3595
Chapter LXXXXXXXXI	3610
Chapter LXXXXXXXII	3625
Chapter LXXXXXXXIII	3640
Chapter LXXXXXXXIV	3655
Chapter LXXXXXXXV	3670
Chapter LXXXXXXXVI	3685
Chapter LXXXXXXXVII	3700
Chapter LXXXXXXXVIII	3715
Chapter LXXXXXXXIX	3730
Chapter LXXXXXXXX	3745
Chapter LXXXXXXXXI	3760
Chapter LXXXXXXXII	3775
Chapter LXXXXXXXIII	3790
Chapter LXXXXXXXIV	3805
Chapter LXXXXXXXV	3820
Chapter LXXXXXXXVI	3835
Chapter LXXXXXXXVII	3850
Chapter LXXXXXXXVIII	3865
Chapter LXXXXXXXIX	3880
Chapter LXXXXXXXX	3895
Chapter LXXXXXXXXI	3910
Chapter LXXXXXXXII	3925
Chapter LXXXXXXXIII	3940
Chapter LXXXXXXXIV	3955
Chapter LXXXXXXXV	3970
Chapter LXXXXXXXVI	3985
Chapter LXXXXXXXVII	4000
Chapter LXXXXXXXVIII	4015
Chapter LXXXXXXXIX	4030
Chapter LXXXXXXXX	4045
Chapter LXXXXXXXXI	4060
Chapter LXXXXXXXII	4075
Chapter LXXXXXXXIII	4090
Chapter LXXXXXXXIV	4105
Chapter LXXXXXXXV	4120
Chapter LXXXXXXXVI	4135
Chapter LXXXXXXXVII	4150
Chapter LXXXXXXXVIII	4165
Chapter LXXXXXXXIX	4180
Chapter LXXXXXXXX	4195
Chapter LXXXXXXXXI	4210
Chapter LXXXXXXXII	4225
Chapter LXXXXXXXIII	4240
Chapter LXXXXXXXIV	4255
Chapter LXXXXXXXV	4270
Chapter LXXXXXXXVI	4285
Chapter LXXXXXXXVII	4300
Chapter LXXXXXXXVIII	4315
Chapter LXXXXXXXIX	4330
Chapter LXXXXXXXX	4345
Chapter LXXXXXXXXI	4360
Chapter LXXXXXXXII	4375
Chapter LXXXXXXXIII	4390
Chapter LXXXXXXXIV	4405
Chapter LXXXXXXXV	4420
Chapter LXXXXXXXVI	4435
Chapter LXXXXXXXVII	4450
Chapter LXXXXXXXVIII	4465
Chapter LXXXXXXXIX	4480
Chapter LXXXXXXXX	4495
Chapter LXXXXXXXXI	4510
Chapter LXXXXXXXII	4525
Chapter LXXXXXXXIII	4540
Chapter LXXXXXXXIV	4555
Chapter LXXXXXXXV	4570
Chapter LXXXXXXXVI	4585
Chapter LXXXXXXXVII	4600
Chapter LXXXXXXXVIII	4615
Chapter LXXXXXXXIX	4630
Chapter LXXXXXXXX	4645
Chapter LXXXXXXXXI	4660
Chapter LXXXXXXXII	4675
Chapter LXXXXXXXIII	4690
Chapter LXXXXXXXIV	4705
Chapter LXXXXXXXV	4720
Chapter LXXXXXXXVI	4735
Chapter LXXXXXXXVII	4750
Chapter LXXXXXXXVIII	4765
Chapter LXXXXXXXIX	4780
Chapter LXXXXXXXX	4795
Chapter LXXXXXXXXI	4810
Chapter LXXXXXXXII	4825
Chapter LXXXXXXXIII	4840
Chapter LXXXXXXXIV	4855
Chapter LXXXXXXXV	4870
Chapter LXXXXXXXVI	4885
Chapter LXXXXXXXVII	4900
Chapter LXXXXXXXVIII	4915
Chapter LXXXXXXXIX	4930
Chapter LXXXXXXXX	4945
Chapter LXXXXXXXXI	4960
Chapter LXXXXXXXII	4975
Chapter LXXXXXXXIII	4990
Chapter LXXXXXXXIV	5005
Chapter LXXXXXXXV	5020
Chapter LXXXXXXXVI	5035
Chapter LXXXXXXXVII	5050
Chapter LXXXXXXXVIII	5065
Chapter LXXXXXXXIX	5080
Chapter LXXXXXXXX	5095
Chapter LXXXXXXXXI	5110
Chapter LXXXXXXXII	5125
Chapter LXXXXXXXIII	5140
Chapter LXXXXXXXIV	5155
Chapter LXXXXXXXV	5170
Chapter LXXXXXXXVI	5185
Chapter LXXXXXXXVII	5200
Chapter LXXXXXXXVIII	5215
Chapter LXXXXXXXIX	5230
Chapter LXXXXXXXX	5245
Chapter LXXXXXXXXI	5260
Chapter LXXXXXXXII	5275
Chapter LXXXXXXXIII	5290
Chapter LXXXXXXXIV	5305
Chapter LXXXXXXXV	5320
Chapter LXXXXXXXVI	5335
Chapter LXXXXXXXVII	5350
Chapter LXXXXXXXVIII	5365
Chapter LXXXXXXXIX	5380
Chapter LXXXXXXXX	5395
Chapter LXXXXXXXXI	5410
Chapter LXXXXXXXII	5425
Chapter LXXXXXXXIII	5440
Chapter LXXXXXXXIV	5455
Chapter LXXXXXXXV	5470
Chapter LXXXXXXXVI	5485
Chapter LXXXXXXXVII	5500
Chapter LXXXXXXXVIII	5515
Chapter LXXXXXXXIX	5530
Chapter LXXXXXXXX	5545
Chapter LXXXXXXXXI	5560
Chapter LXXXXXXXII	5575
Chapter LXXXXXXXIII	5590
Chapter LXXXXXXXIV	5605
Chapter LXXXXXXXV	5620
Chapter LXXXXXXXVI	5635
Chapter LXXXXXXXVII	5650
Chapter LXXXXXXXVIII	5665
Chapter LXXXXXXXIX	5680
Chapter LXXXXXXXX	5695
Chapter LXXXXXXXXI	5710
Chapter LXXXXXXXII	5725
Chapter LXXXXXXXIII	5740
Chapter LXXXXXXXIV	5755
Chapter LXXXXXXXV	5770
Chapter LXXXXXXXVI	5785
Chapter LXXXXXXXVII	5800
Chapter LXXXXXXXVIII	5815
Chapter LXXXXXXXIX	5830
Chapter LXXXXXXXX	5845
Chapter LXXXXXXXXI	5860
Chapter LXXXXXXXII	5875
Chapter LXXXXXXXIII	5890
Chapter LXXXXXXXIV	5905
Chapter LXXXXXXXV	5920
Chapter LXXXXXXXVI	5935
Chapter LXXXXXXXVII	5950
Chapter LXXXXXXXVIII	5965
Chapter LXXXXXXXIX	5980
Chapter LXXXXXXXX	5995
Chapter LXXXXXXXXI	6010
Chapter LXXXXXXXII	6025
Chapter LXXXXXXXIII	6040
Chapter LXXXXXXXIV	6055
Chapter LXXXXXXXV	6070
Chapter LXXXXXXXVI	6085
Chapter LXXXXXXXVII	6100
Chapter LXXXXXXXVIII	6115
Chapter LXXXXXXXIX	6130
Chapter LXXXXXXXX	6145
Chapter LXXXXXXXXI	6160
Chapter LXXXXXXXII	6175
Chapter LXXXXXXXIII	6190
Chapter LXXXXXXXIV	6205
Chapter LXXXXXXXV	6220
Chapter LXXXXXXXVI	6235
Chapter LXXXXXXXVII	6250
Chapter LXXXXXXXVIII	6265
Chapter LXXXXXXXIX	6280
Chapter LXXXXXXXX	6295
Chapter LXXXXXXXXI	6310
Chapter LXXXXXXXII	6325
Chapter LXXXXXXXIII	6340
Chapter LXXXXXXXIV	6355
Chapter LXXXXXXXV	6370
Chapter LXXXXXXXVI	6385
Chapter LXXXXXXXVII	6400
Chapter LXXXXXXXVIII	6415
Chapter LXXXXXXXIX	6430
Chapter LXXXXXXXX	6445
Chapter LXXXXXXXXI	6460
Chapter LXXXXXXXII	6475
Chapter LXXXXXXXIII	6490
Chapter LXXXXXXXIV	6505
Chapter LXXXXXXXV	6520
Chapter LXXXXXXXVI	6535
Chapter LXXXXXXXVII	6550
Chapter LXXXXXXXVIII	6565
Chapter LXXXXXXXIX	6580
Chapter LXXXXXXXX	6595
Chapter LXXXXXXXXI	6610
Chapter LXXXXXXXII	6625
Chapter LXXXXXXXIII	6640
Chapter LXXXXXXXIV	6655
Chapter LXXXXXXXV	6670
Chapter LXXXXXXXVI	6685
Chapter LXXXXXXXVII	6700
Chapter LXXXXXXXVIII	6715
Chapter LXXXXXXXIX	673

# DAFTAR ISI



PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR SKEMA	xii
PENDAHULUAN	1
1. Sistem Pemerintahan Hindia Belanda	1
2. Pilar-Pilar Pemerintahan Hindia Belanda	2
3. Pembagian Wilayah Hindia Belanda	3
a. Pembagian yang bersifat Staatkundig (penyelenggaraan pemerintahan)	4
b. Pembagian yang bersifat Administratief	4
c. Pembagian yang bersifat Staatsrechtelijk (yuridis ketatanegaraan)	5
4. Peristilahan	5
5. Sistematika Uraian	9

## BAB I SEJARAH TERBENTUKNYA

### BADAN-BADAN PEMERINTAHAN PUSAT HINDIA BELANDA

1. Masa VOC	11
a. Latar Belakang VOC	11
b. Tujuan VOC	12
c. VOC di Hindia Timur	12
d. Sistem Organisasi VOC di Hindia Timur	13
e. Keruntuhan VOC	15
2. Masa Peralihan	17
a. Masa Pemerintahan Bataafse Republiek	17
b. Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels	17
c. Masa Pemerintahan Thomas Stamford Raffles	19
3. Masa Hindia Belanda	20
a. Masa Stelsel Tanah	20
b. Masa Sistem Tanam Paksa	23
c. Masa Kolonial Modern	24

## BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

### PEMERINTAHAN PUSAT HINDIA BELANDA

1. Opperbestuur	31
2. Gubernur Jenderal	32
a. Kedudukan Gubernur Jenderal	33
1) <i>Dasar Hukum dan Fungsi Gubernur Jenderal</i>	32
2) <i>Cara Pengisian Jabatan Gubernur Jenderal</i>	33
b. Kekuasaan Gubernur Jenderal	35

1) Bidang Perundang-undangan ( <i>Wetgeving</i> )	35
2) Bidang Pelaksanaan Pemerintahan ( <i>Uitvoering</i> )	37
c. Pertanggungjawaban Gubernur Jenderal	39
d. Para Pembantu Gubernur Jenderal	40
1) <i>Letnan Gubernur Jenderal</i>	40
2) <i>Departementen van Algemeen Bestuur</i>	41
3) <i>Algemeene Secretari</i>	41
<b>3. Raad van Nederlandsch-Indie</b>	42
a. Susunan dan Cara Pengisian	
Raad van Nederlandsch-Indie	42
1) <i>Dasar Hukum dan Susunan Raad van Nederlandsch-Indie</i>	42
2) <i>Cara Pengisian Raad van Nederlandsch-Indie</i>	42
b. Kekuasaan Raad van Nederlandsch-Indie	43
1) <i>Fungsi Raad van Nederlandsch-Indie</i>	43
2) <i>Persidangan Raad van Nederlandsch-Indie</i>	44
<b>4. Volksraad</b>	45
a. Kedudukan dan Susunan Volksraad	45
1) <i>Dasar Hukum dan Fungsi Volksraad</i>	45
2) <i>Susunan dan Cara Pengisian Volksraad</i>	45
b. Kekuasaan Volksraad	48
1) <i>Persidangan Volksraad</i>	48
2) <i>Hak dan Kewajiban Volksraad</i>	49
c. Alat-Alat Kelengkapan Volksraad	49
1) <i>Pimpinan Volksraad</i>	49
2) <i>Sekretaris Volksraad</i>	50
3) <i>College van Gedelegeerden</i>	50
<b>5. Algemeene Rekenkamer</b>	51
<b>6. Kekuasaan Kehakiman</b>	52
a. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman	52
b. Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie	53
1) <i>Fungsi dan Susunan Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie</i>	53
2) <i>Kekuasaan Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie</i>	53
3) <i>Procureur Generaal</i>	54
<b>IKHTISAR</b>	55

<b>BAB III SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DI DAERAH HINDIA BELANDA</b>	57
<b>1. Pengantar</b>	57
a. Prinsip-Prinsip Pemerintahan di Daerah Hindia Belanda	57
b. Sistematika Uraian	57

2.	Perkembangan Pemerintahan di Daerah-----	58
a.	Pilar Administratie dan Zelfstandige Gemeenschappen-----	58
b.	Decentralistatiewet 1903-----	59
3.	Susunan Pemerintahan di Daerah-----	62
a.	Jawa-Madura-----	62
1)	<i>Daerah Langsung</i> -----	62
2)	<i>Vorstenlanden</i> -----	64
b.	Tanah Seberang-----	66
4.	Susunan Pemerintahan yang bersifat Khusus-----	71
a.	Susunan dan Kedudukan Swapraja-----	71
b.	Pemerintahan di Lingkungan Golongan Timur Asing-----	73
IKHTISAR-----		75

#### BAB IV SUSUNAN DAN KEDUDUKAN BADAN-BADAN PERADILAN HINDIA BELANDA-----

1.	Pengantar-----	77
a.	Pilar Justitie-----	77
b.	Sistematika Uraian-----	77
2.	Badan Peradilan Gubernemen-----	78
a.	<i>Peradilan Sipil</i> -----	78
1)	Landgerecht-----	80
2)	Peradilan Pribumi-----	81
a)	<i>Pengadilan Bawah di Jawa-Madura</i> -----	81
(1)	<i>Districtsgerecht</i> -----	81
(2)	<i>Regentschapsgerecht</i> -----	82
b)	<i>Pengadilan Bawah di Tanah Seberang</i> -----	82
(1)	<i>Magistraatsgerecht</i> -----	83
(2)	<i>Negorijsrechtbank</i> -----	85
(3)	<i>Districtsgerecht</i> -----	85
(4)	<i>Districtsraad</i> -----	86
c)	<i>Landraad</i> -----	87
3)	Peradilan Eropa-----	88
a)	<i>Residentiegerecht</i> -----	88
(1)	<i>Residentiegerecht di Jawa-Madura</i> -----	88
(2)	<i>Residentiegerecht di Tanah Seberang</i> -----	89
b)	<i>Raad van Justitie</i> -----	91
c)	<i>Hooggerechtschhof van Nederlandsch-Indie</i> -----	93
4)	<i>Peradilan Agama</i> -----	94
a)	Jawa-Madura-----	94
(1)	Raad Agama-----	94
(2)	<i>Hof voor Islamieten Zaken</i> -----	95

b)	<i>Afdeelingen Bandjarmasin dan Hoeloe Soengei</i> -----	95
(1)	<i>Kadigerecht</i> -----	95
(2)	<i>Opperkadigerecht</i> -----	96
c)	<i>Pengadilan Agama di lain-lain tempat</i> -----	96
b.	<b>Peradilan Militer</b> -----	96
1)	<i>Krijgsraad</i> -----	97
2)	<i>Zeekrijgsraad</i> -----	97
3)	<i>Hoog Militair Gerechtshof</i> -----	98
3.	<b>Badan Peradilan Lain</b> -----	98
a.	<b>Badan Peradilan Adat</b> -----	98
b.	<b>Badan Peradilan Swapraja</b> -----	101
1)	<i>Badan Peradilan Swapraja di Tanah Seberang</i> -----	101
2)	<i>Badan Peradilan Swapraja di Vorstenlanden</i> -----	102
a)	<i>Kasoeltanan Ngajodyakarta Hadiningrat</i> -----	103
(1)	<i>Soerambi</i> -----	103
(2)	<i>Pangadilan Kraton Darah Dalem</i> -----	103
(3)	<i>Soeltan</i> -----	103
b)	<i>Kasoenan Soerakarta Hadiningrat</i> -----	104
(1)	<i>Pradata</i> -----	104
(2)	<i>Soerambi</i> -----	104
(3)	<i>Pradata Gede</i> -----	104
c)	<i>Kadipaten Mangkoenegaran</i> -----	104
(1)	<i>Soerambi</i> -----	104
(2)	<i>Pradata</i> -----	105
c.	<b>Badan Peradilan Desa</b> -----	105
	<b>IKHTISAR</b> -----	107
	<b>I. Susunan Peradilan Hindia Belanda (Justitie)</b> -----	107
	<b>II. Kekuasaan Hukum Badan Peradilan Gubernemen</b> -----	111
A.	<i>Jawa-Madura</i> -----	111
B.	<i>Tanah Seberang (pada umumnya)</i> -----	112
C.	<i>Residenties Sumatra's Westkust dan Tapanoeli</i> -----	115
D.	<i>Residentie Benkoelen</i> -----	116
E.	<i>Afdeelingen Bandjarmasin dan Hoeloe Soengei</i> -----	116
F.	<i>Residenties Bangka en Billiton dan Manado</i> -----	116
G.	<i>Residentie Molukken</i> -----	118
1.	<i>Onderafdeelingen Amboina, Saparoea, dan Banda, kecuali Teoen-, Nila-, en Seroea-eilanden</i> -----	118
2.	<i>Onderafdeelingen Zuid Nieuw-Guinea dan Boven Digoel</i> -----	118
	<b>PENUTUP</b> -----	119
1.	<i>Berakhirnya Pemerintah Kolonial Pusat</i> -----	119
2.	<i>Berkhirnya Pemerintahan di Daerah Hindia Belanda</i> -----	119
3.	<i>Berakhirnya Peradilan Hindia Belanda</i> -----	121
a.	<i>Masa Awal Kemerdekaan</i> -----	121



	b. Sejak Undang-Undang Dasar Sementara 1950-----	122
4.	Beberapa Perubahan Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi-----	123
	a. Tugas dan Keudukan MPR Pasca Reformasi -----	124
	b. Hubungan Kerja Presiden dan DPR Pasca Reformasi -----	124
	c. Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Reformasi -----	125
	d. Lembaga-Lembaga Baru Pasca Reformasi-----	126

**DAFTAR 1**

Daerah Langsung ( <i>Direct Gebieden van Nederlandsch-Indie</i> ) -----	127
--	-----

**DAFTAR 2**

Daerah Tidak Langsung ( <i>Indirect Gebieden van Nederlandsch-Indie</i> ) -----	129
--	-----

**DAFTAR 3**

Susunan Pemerintahan di Daerah ( <i>Gewestelijke en Plaatselijke Bestuur</i> )-----	137
--	-----

**DAFTAR 4**

Badan Peradilan Gubernemen ( <i>Gouvernementsrechtspraak</i> )-----	162
--	-----

**DAFTAR 5**

Badan Peradilan Adat ( <i>Inheemsche Rechtspraak</i> ) -----	168
---	-----

**DAFTAR 6**

Badan Peradilan Swapraja ( <i>Zelfbestuursrechtspraak</i> ) -----	173
--	-----

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> -----	181
-----------------------------	-----

## DAFTAR SKEMA

<b>Skema 1</b>	Susunan Pemerintahan Hindia Belanda (menurut Logemann)-----	vi
<b>Skema 2</b>	Susunan dan Kedudukan Pemerintahan di Daerah (Jawa-Madura: Daerah Langsung)-----	63
<b>Skema 3</b>	Susunan dan Kedudukan Pemerintahan di Daerah (Jawa-Madura: <i>Vorstenlanden</i> )-----	65
<b>Skema 4</b>	Susunan dan Kedudukan Pemerintahan di Daerah (Tanah Seberang)-----	67
<b>Skema 5</b>	Susunan dan Kedudukan Peradilan Sipil-----	79
<b>Skema 6</b>	Susunan dan Kedudukan Peradilan Militer-----	97
<b>Skema 7</b>	Susunan dan Kedudukan Badan Peradilan Gubernemen ( <i>Burgertijke Rechtspraak</i> /Peradilan Sipil)-----	108
<b>Skema 8</b>	Susunan dan Kedudukan Badan Peradilan Adat dan Swapraja (Tanah Seberang)-----	110
<b>Skema 9</b>	Pengadilan Pribumi Perkara Perdata (Jawa-Madura)-----	112
<b>Skema 10</b>	Pengadilan Pribumi Perkara Perdata (Tanah Seberang pada umumnya)-----	114
<b>Skema 11</b>	Pengadilan Pribumi Perkara Perdata ( <i>Residenties</i> Sumatra's Westkust dan Tapanoeli)-----	115
<b>Skema 12</b>	Pengadilan Pribumi Perkara Perdata ( <i>Residenties</i> Bangka en Billiton dan Manado)-----	117

# PENDAHULUAN

## 1. SISTEM PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Secara geografis Clive Day (1972:409) membagi sistem pemerintahan Hindia Belanda itu ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Pemerintahan Induk di Den Haag, atau yang biasa disebut *Oppebestuur* (Pemerintahan Tertinggi);
- b. Pemerintahan Kolonial Pusat di Batavia, yang mempunyai fungsi legislatif dan eksekutif. Pemerintah di Batavia ini menerima garis-garis besar haluan kolonial (*aanwijzingen*) yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pihak *Oppebestuur* di Negeri Belanda. Garis-garis besar haluan kolonial ini kemudian dioperasionalisasikan dan selanjutnya dilaksanakan di Hindia Belanda;
- c. Pemerintahan di Daerah, yang tersebar di seluruh pelosok Hindia Belanda, yang melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing.

Secara yuridis susunan ketatanegaraan seperti tersebut di atas didasarkan pada pasal 62 - 64 *Grondwet* 1938<sup>1</sup>. Pasal 62 *Grondwet* 1938 mengatur bahwa Raja memegang kekuasaan Pemerintahan Tertinggi (*Oppebestuur*) atas Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao. Adapun Pemerintahan Umum (*het Algemeen Bestuur*) di Hindia Belanda, atas nama Raja dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal dengan cara yang diatur dengan *wet*.

Mengenai pelaksanaan kekuasaan kolonialnya ini Raja setiap tahun bertanggung jawab kepada *Staten-Generaal* (parlemen Belanda). Namun demikian, karena Negeri Belanda itu adalah negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, maka Raja tidak dapat diganggu gugat (*onschendbaar*). Oleh karena itu *Minister van Kolonien* (Menteri urusan Jajahan)-lah yang bertanggung jawab kepada *Staten-Generaal* (pasal 55 *Grondwet* 1938).

Adapun mengenai masalah susunan ketatanegaraan di Hindia Belanda, pasal 63 *Grondwet* 1938 menentukan bahwa masalah tersebut harus diatur dengan suatu *wet*. Hal ini dengan ketentuan bahwa pengaturan mengenai

---

<sup>1</sup> *Grondwet* 1938 merupakan *Grondwet* Belanda yang terakhir, sesaat sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia.

urusan intern Hindia Belanda diserahkan kepada badan-badan pemerintahan Hindia Belanda dengan cara yang diatur dengan wet yang bersangkutan. Akan tetapi pasal 63 *Grondwet* 1938 ini juga tetap memberikan kekuasaan-kekuasaan khusus kepada Raja.

Sebagai pelaksanaan pasal 63 *Grondwet* 1938 itu, berlakulah *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie (IS)*<sup>2</sup>. Secara garis besar, IS memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bab	Isi	Pasal
I	Gubernur Jenderal dan <i>Raad van Nederlandsch-Indie</i>	1-2
II	<i>Volksraad</i>	3-80
III	Perundang-undangan	81-100
IV	Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Masalah Peminjaman Dana	101-114
V	Departemen Pemerintahan Umum dan <i>Algemeene Rekenkamer</i>	115-117
VI	Pemerintahan Wilayah dan Daerah	118-129
VII	Kekuasaan Kehakiman	130-159
VIII	Penduduk	160-172
IX	Agama	173-178
X	Pendidikan	179-182
XI	Perdagangan dan Perkapalan	183-185
XII	Pengairan	186
	Aturan Penutup	187

## 2. PILAR-PILAR PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Adapun sistem pemerintahan Hindia Belanda yang dimaksud di sini adalah sistem pemerintahan dalam arti luas. Berdasarkan skema Pemerintahan Hindia Belanda seperti yang dibuat oleh Logemann (1944) seperti yang tampak dalam skema 1, maka sistem pemerintahan yang dimaksud di sini meliputi susunan Pemerintahan (Pusat), susunan Pemerintahan di Daerah serta susunan Peradilan Hindia Belanda. Apabila kita simak bersama skema Pemerintahan Hindia Belanda itu, tampaklah bahwa terdapat tiga buah pilar yang menopang Pemerintahan Hindia Belanda (*Indische Regering*). Ketiga pilar itu adalah:

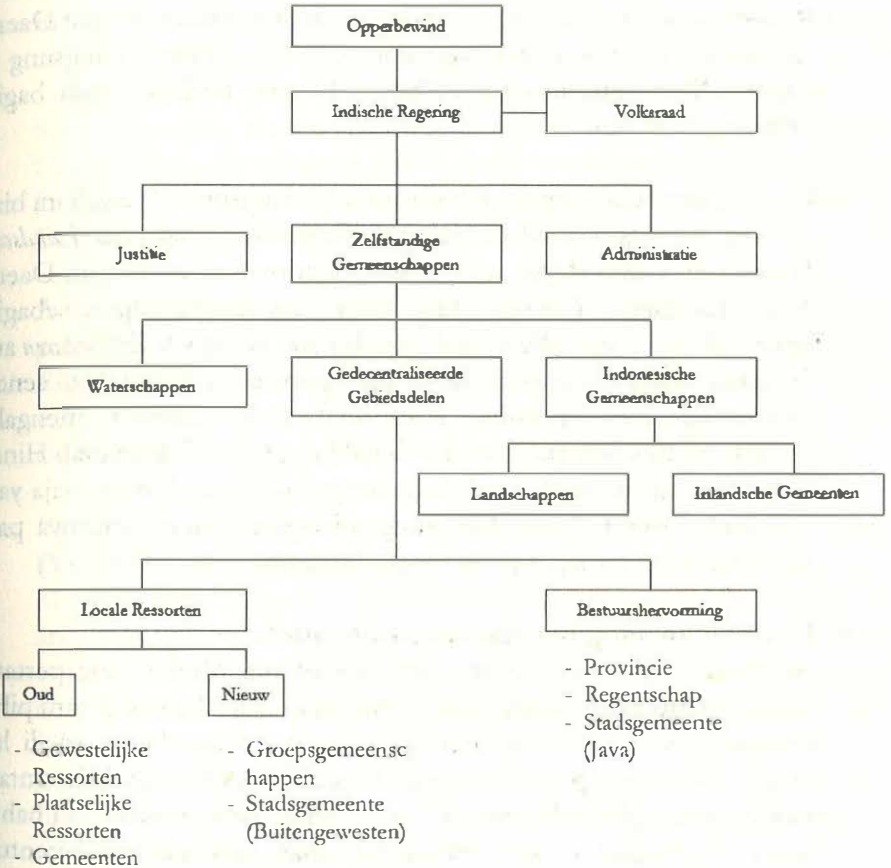
a. Pilar *Administratie*,

<sup>2</sup> IS ini sebenarnya telah berlaku sejak 1 Januari 1926, sewaktu *Grondwet* 1922 masih berlaku.

- b. Pilar *Zelfstandige Gemeenschappen*,
- c. Pilar *Justitie*.

Bagaimana ketiga pilar ini diselenggarakan, uraian pada bab-bab yang selanjutnya akan mencoba untuk menjelaskan secara terperinci.

**SKEMA 1:**  
**Susunan Pemerintahan Hindia Belanda**  
**(menurut Logemann)**



(Sumber : J.H.A. Logemann, *College Aanteekeningen over het Staatsrecht van Nederlandsch-Indië*, 's Gravenhage: W. van Hoeve, 1947)

### 3. PEMBAGIAN WILAYAH HINDIA BELANDA

Untuk dapat memahami sistem pemerintahan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda secara akurat, perlu kita memahami terlebih dahulu masalah pembagian wilayah di Hindia Belanda itu. Ada beberapa



macam pola yang ada untuk membagi daerah ataupun wilayah Hindia Belanda itu. Cara pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Pembagian yang bersifat *Staatskundig* (Penyelenggaraan Pemerintahan):**

Berdasarkan cara pembagian ini, wilayah Hindia Belanda terbagi atas dua bagian. Bagian yang pertama adalah wilayah yang diperintah oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda secara langsung. Wilayah ini biasa disebut sebagai *Direct Gebied* atau *Gouvernementsgebied* atau *Rechtstreeks Bestuurd Gebied*, yang dapat diindonesiakan dengan Daerah Langsung. Wilayah mana saja yang termasuk Daerah Langsung ini dapat dilihat daftarnya pada Daftar 1, yang terdapat pada bagian belakang buku ini.

Bagian yang kedua diperintah secara tidak langsung. Wilayah ini biasa disebut sebagai *Indirect Gebied* atau *Zelfbestuursgebied* atau *Landschap Gebied* atau *Landschappen*, yang dapat diindonesiakan dengan Daerah Tidak Langsung. Daerah Tidak Langsung yang meliputi sebagian besar wilayah Hindia Belanda ini terdiri atas sejumlah *Zelfbesturen* atau Swapraja yang pada prinsipnya mempunyai pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) yang bersifat tradisional (asli), namun mengakui kedaulatan Belanda atas mereka. Sebaliknya pihak Pemerintah Hindia Belanda tetap mengakui keberadaannya ini. Wilayah mana saja yang termasuk Daerah Tidak Langsung ini dapat dilihat daftarnya pada Daftar 2, yang terdapat pada bagian belakang buku ini.

**b. Pembagian yang bersifat *Administratief*:**

Ada dua model pembagian administratif ini. Model yang pertama adalah model pembagian wilayah menjadi Jawa-Madura di satu pihak dengan Tanah Seberang (*Buitengewesten* atau *Outer Provinces*) di lain pihak. Tidak ada pengaturan yuridis yang bersifat eksplisit tentang model pembagian administratif ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar pembagian wilayah ini semata-mata berdasarkan ketentuan yang tidak tertulis (Kleintjes, 1932: 68-69).

Pembagian wilayah menjadi Jawa-Madura dan Tanah Seberang ini berpangkal pada kepentingan kolonial Belanda, yaitu:

- 1) Jawa merupakan tempat pemukiman utama orang Belanda di Hindia Belanda,
- 2) Jawa adalah sumber devisa utama bagi Negeri Belanda.

Hal ini tampak jelas dengan berhasilnya program *Cultuurstelsel* yang amat menguntungkan Belanda.

Sementara itu Tanah Seberang, kecuali *Residentie* Bangka en Billiton yang merupakan penghasil timah, sering dianggap sebagai pos rugi. Namun demikian Tanah Seberang ini harus tetap dipertahankan sebagai satu kesatuan dengan Jawa-Madura. Hal ini mengingat kepentingan yang lebih bersifat strategis daripada ekonomis. Terlebih-lebih dalam rangka menghadapi pihak Inggris yang mempunyai kepentingan yang besar pula di kawasan Asia Tenggara ini.

Selanjutnya baik di Jawa-Madura maupun di Tanah Seberang terdapat Daerah Langsung maupun Daerah Tidak Langsung ini. Daerah Tidak Langsung di Jawa-Madura terkenal dengan sebutan *Vorstenlanden*. Daerah ini meliputi daerah Yogyakarta dan Surakarta.

Adapun model pembagian administratif yang kedua adalah pembagian wilayah Hindia Belanda ke dalam sejumlah *Administratief Ressorten* atau yang sekarang dikenal sebagai Wilayah Administratif, yaitu: *Gouvernement, Residentie, Afdeeling, Onderafdeeling, District, dan Onderdistrict*.

### c. Pembagian yang bersifat *Staatsrechtelijk* (Yuridis-Ketatanegaraan):

Mengacu pada konsepsi dan skema Logemann seperti tersebut di atas, maka menurut cara pembagian yang terakhir ini Hindia Belanda terbagi atas sejumlah Daerah Otonom berdasarkan asas desentralisasi. Baik Daerah Otonom ciptaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (*Gedecentraliseerde Gebiedsdelen*) maupun Daerah Otonom asli Indonesia (*Indonesische Gemeenschappen*). Oleh karena itu uraian tentang hal ini akan dilakukan sekaligus dengan uraian mengenai asas-asas desentralisasi tersebut.

## 4. PERISTILAHAN

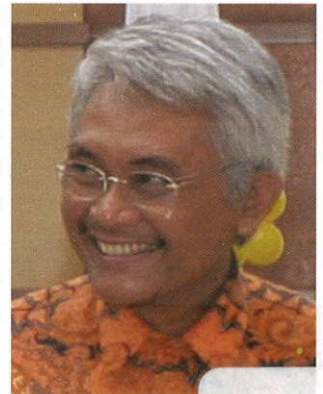
Dalam uraian-uraian selanjutnya seringkali harus dipergunakan peristilahan dalam bahasa Belanda, terutama peristilahan yang menyangkut nama tempat dan jabatan/lembaga publik. Hal ini terpaksa dilakukan demi terpeliharanya aspek kepastian ataupun akurasi data. Sebab, seringkali dijumpai nama jabatan/ lembaga publik maupun nama

# Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah, serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda

Dewasa ini sistem Pemerintahan (baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah) dan sistem Peradilan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*) telah mulai dipahami lagi. Terutama oleh kalangan generasi muda, yang tidak secara langsung mendapat kuliah dari para ahli hukum didikan Belanda. Padahal untuk memahami hukum positif kita sekarang ini tidak jarang pengetahuan kita tentang sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda itu amat membantu. Dengan kata lain, untuk memahami hukum positif kita sekarang ini kiranya merupakan suatu syarat bagi kita untuk mengerti sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda tersebut. Hal ini mengingat bahwa sistem pemerintahan dan peradilan kita dewasa ini banyak bertumpu pada sistem pemerintahan dan peradilan Hindia Belanda. Setidak-tidaknya secara historis amat berpengaruh.

Dalam rangka itulah buku ini disusun dengan judul **Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda**, dengan maksud untuk menggali kembali pengetahuan sejarah hukum tersebut di atas. Secara lebih luas, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sejarah Hukum Indonesia. Bagaimanapun juga Sejarah Hukum Indonesia tetap merupakan sesuatu yang pokok guna memahami Tata Hukum Indonesia itu sendiri.

Koerniatmanto Soetoprawiro, Guru Besar Hukum Pertanian Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Mengenyam pendidikan Program Sarjana Hukum di Unpar (1981), Program Magister di Unpad (1988), dan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga (1998). Saat ini menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Unpar dan mengajar Program Sarjana (Hukum Tatanegara, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Pertanian), dan Program Magister (Sejarah Hukum, Masalah Kemiskinan dan Keadilan Sosial).



Beberapa karya tulis, Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia: Asal-Usul & Perkembangannya (1994), Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian (1994 & 1996), Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme (2003), Pengantar Hukum Pertanian (2013), Hukum Agribisnis dan Agroindustri Jilid I dan II (2016).

**UNPAR PRESS**

Unpar Press  
Jl. Ciumbuleuit 100, Bandung 40141  
unparpress@unpar.ac.id

PERPUSTAKAAN UNPAR



ISBN 978-602-6980-70-0

